

**PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN GRADUASI MANDIRI**

**( TESIS )**

**Oleh**

**MERI ARMIN**

**NPM 1926061019**



**MAGISTER ILMUADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN GRADUASI MANDIRI**

**Oleh**

**MERI ARMIN**

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan sebagai salah satu *epicentrum and center of excellence* adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Indikator keberhasilan PKH adalah graduasi KPM dari kepesertaan. Permasalahan graduasi merupakan hal yang menarik dan menjadi ciri dari bantuan sosial PKH. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam upaya meningkatkan graduasi mandiri di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji proses pemberdayaan KPM PKH menggunakan tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) dalam (Bahri, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan, proses pemberdayaan di Desa Bumisari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan sudah dilakukan namun belum mampu mendorong KPM PKH untuk melakukan graduasi mandiri. Terdapat beberapa permasalahan

dalam proses pelaksanaan pemberdayaan KPM PKH di desa tersebut. **Pada tahap penyadaran**, pemahaman KPM terhadap bantuan sosial PKH masih beragam, namun dapat pandangan positif terhadap upaya peningkatan kemampuan keluarga, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat efektivitas pelaksanaannya. **Pada tahap pengkapasitasan**, pada pengkapasitasan individu KPM PKH belum menunjukkan peningkatan yang signifikan namun upaya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dilakukan pada tahap pengkapasitasan organisasi. **Pada tahap pemberian daya atau empowerment**, terdapat beberapa tantangan yang menghambat pemerintah dalam memberikan daya kepada KPM PKH, seperti keterbatasan anggaran, alokasi sumber daya yang tidak merata, koordinai antar lembaga yang tidak optimal dan tantangan pemantauan dan evaluasi.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Program Keluarga Harapan, Graduasi**

## **ABSTRACT**

### **BENEFICIARY FAMILY EMPOWERMENT HOPE FAMILY PROGRAM (KPM PKH) IN AN EFFORT TO IMPROVE INDEPENDENT GRADUATION**

**BY**

**MERI ARMIN**

*Empowerment is one of the steps taken by the government to improve the welfare of the poor. One of the government programs related to empowerment and one of the epicenters and centers of excellence is the Family Hope Program (PKH). PKH's success indicator is KPM's graduation from membership. The problem of graduation is an interesting thing and characterizes PKH social assistance. The purpose of this study was to describe and analyze the process of empowering beneficiary families of the Family Hope Program (KPM PKH) in an effort to increase independent graduation in Bumisari Village, Natar District, South Lampung Regency. The research approach used is a case study approach with a qualitative research method by examining the PKH KPM empowerment process using the stages of empowerment according to Wrihatnolo and Dwidjowijoto (2008) in Bahri, 2019. The results of this study indicate that the empowerment process in Bumisari Village, Natar District, and South Lampung Regency has been carried out but has not been able to encourage KPM PKH to carry out independent graduation. There were several problems in the process of implementing PKH KPM empowerment in the village. At the awareness stage, KPM's understanding of PKH social assistance still varied; however, they received a positive view of efforts to increase family capacity, although there were differences of opinion regarding the level of effectiveness of its implementation. At the capacity building stage, the individual capacity of KPM PKH has not shown a significant increase, but efforts to support the central government and local governments have been carried out at the organizational capacity building stage. At the stage of giving power or empowerment, there are several challenges that hinder the government from providing power to KPM PKH, such as budget limitations, unequal allocation of resources, coordination between institutions that is not optimal, and challenges of monitoring and evaluation.*

**Keywords:** *Empowerment, Family Hope Program, Graduation*

**PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (KPM PKH)  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN GRADUASI MANDIRI**

**Oleh**

**MERI ARMIN**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER SAINS**

**Program Pasca Sarjana Magiter Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis

**: PEMBERDAYAAN KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (KPM PKH)  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
GRADUASI MANDIRI**

Nama Mahasiswa

**: Meri Armin**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1926061019**

Program Studi

**: Magister Ilmu Administrasi**

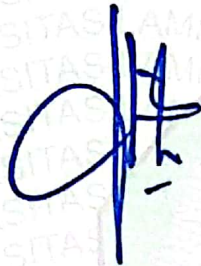
Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

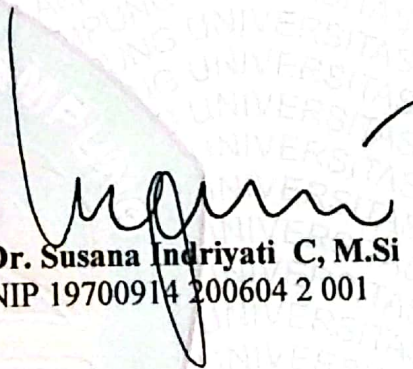
**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



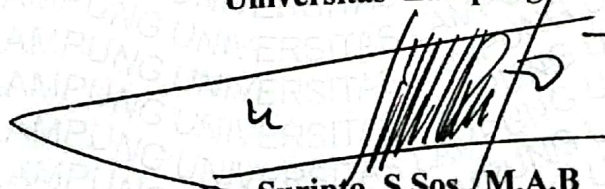
**Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P**  
NIP 19830815 201012 2 002

**Pembimbing II**



**Dr. Susana Indriyati C, M.Si**  
NIP 19700914 200604 2 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**




**Dr. Supto, S.Sos., M.A.B**  
NIP 19690226 199903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji  
Ketua

: Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P



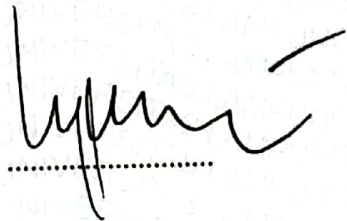
.....

Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si



.....

Sekretaris : Dr. Susana Indriyati C, M.Si



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
  
Prof. Dr. Nurhaida, M.Si.  
NIP. 196510807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung  
  
Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Juni 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Meri Armin  
NPM. 1926061019



## RIWAYAT HIDUP



Meri Armin, atau sering kali disapa Meri lahir di Ngulak 21 Mei 1994, anak ketiga dari pasangan Bapak Aruji dan Ibu Mimin. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu SD Negeri Macang Sakti, SMP Negeri 3 Natar, SMK 1 Swadhipa Natar. Pada Tahun 2013, penulis melanjutkan Srata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bandar Lampung.

Selama menjalankan program Studi Strata Satu (S1), penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi diantaranya terdaftar sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) dan anggota Himpunan Mahasiswa PUBLIK (HIMA PUBLIK). Kemudian, Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Srata II (S2) di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan mengambil konsentrasi Administrasi Publik.

## **MOTTO**

*“Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”  
(QS Al-Hadid: 20)*

*“Jangan kekanak-kanakan. Hadapi kenyataan dengan dewasa”  
(Windry Ramadhina)*

*“Jangan menyerah! Yang harus kamu lakukan adalah mencobanya lagi”  
(Bom 2NE1)*

*“Tidak ada seorangpun di dunia ini yang benar-benar baik-baik saja, kita hanya tidak tau seberapa keras ia mencoba, dan seberapa kuat tangisnya di atas sajadah”  
(Meri Armin)*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiintelah Engkau Ridhoi Ya Allah langkahhambaMu,  
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Bapak dan Ibu, kakak-kakakku serta keponakan kecilku yang aku sayangi  
sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Administrasi,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul **“PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN GRADUASI MANDIRI”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya tesis ini.
2. Bapak Dr. Suropto, S. Sos., M.AB. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya tesis ini. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala

kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P selaku pembimbing pertama. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya tesis ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang ibu berikan.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati C, M.Si. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat bagi penulis
5. Ibu Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap tesis penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Seluruh informan dan narasumber penelitian yang telah mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini. Bapak Bejo Sungkowo, S.Pd selaku Koordinator PKH Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Liza Afriyanti, S.E selaku Koordinator PKH Kecamatan Natar, teman-Teman pendamping PKH Kecamatan Natar dan KPM PKH Desa Bumisari. Terima kasih telah menjadi

informan dan narasumber penulis semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Bapak Aruji dan Ibu Mimin. Terimakasih untuk seluruh kasih sayang, dan motivasi yang telah bapak dan ibu berikan selama ini. Pak buk menjadi dewasa itu ternyata sulit ya, terlalu banyak hal yang membuatku rasanya ingin menyerah saja, tapi jika dibandingkan segala pengorbanan yang telah bapak dan ibu lakukan maka permasalahan yang aku hadapi tidak ada apa-apanya.
9. Untuk kakak, dan keponakan tercinta Elmanik, Tri Windar Wati, Patrik Atena S.Pd, Agus Priyanto, Raffi Hafiz Elwin Febian, Athar Rizky Yudhistira, dan Adzril Elwin Alvaro. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Triya Andini S.A.P, Eka Erna Wati S.A.B, Ririn Suryani S.A.B, Suci Auliadiningrum S.A.B, dan Siti Cs Squad. Terima kasih atas dukungan, dan segala kebaikan yang telah kalian lakukan.

Bandar Lampung, Juni 2023

Meri Armin

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Konsep Pembangunan .....	15
2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	17
2.3.1 Pengertian pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.3.2 Prinsip Pemberdayaan .....	21
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat .....	22
2.3.4 Tahapan Pemberdayaan .....	23
2.3.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan .....	26
2.3.6 Indikator Keberdayaan Masyarakat .....	26
2.4 Kemiskinan .....	28
2.4.1 Pengertian Kemiskinan .....	28
2.4.2 Faktor Penyebab Kemiskinan .....	29
2.5 Program Keluarga Harapan .....	30
2.5.1 Kebijakan Program Keluarga Harapan .....	30
2.5.2 Tujuan Program Keluarga harapan .....	30
2.5.3 Besaran Bantuan yang diterima KPM PKH .....	31
2.6 Kerangka Pemikiran .....	32

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian .....	35
3.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.4 Instrumen Penelitian .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1 Sejarah Kelurahan Bumisari .....	44
4.1.2 Demografi .....	43
4.1.3 Kependudukan.....	45
4.1.4 Pendidikan.....	47
4.2 Visi dan Misi .....	48
4.2.1 Visi Desa .....	48
4.2.2 Misi Desa .....	48
4.2.3 Potensi dan Masalah .....	49
4.3 Pemberdayaan KPM PKH Desa Bumisari Kecamatan Natar .....	50
4.3.1 Tahap Penyadaran .....	53
4.3.2 Tahap Pengkapasitasan .....	55
4.3.3 Tahap Pemberian daya atau <i>Empowerment</i> .....	69
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN PENELITIAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total KPM PKH Kabupaten Lampung Selatan .....	2
Tabel 2. Rekapitulasi Graduasi KPM PKH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019/2020.....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan .....	24
Tabel 5. Karakteristik Penyebab Kemiskinan .....	27
Tabel 6. Profil Informan Penelitian .....	37
Tabel 7. Masa Kepemimpinan .....	42
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Penduduk Desa Bumisari .....	44
Tabel 9. Data Kelompok PKH Desa Bumisari .....	51
Tabel 10. Pedoman Wawancara .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Graduasi KPM PKH di Indonesia .....	4
Gambar 1.2 Graduasi KPM PKH Kecamatan Natar Tahun 2021.....	6
Gambar 2.1 Indeks Bantuan PKH .....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	30
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ) .....	38
Gambar 4.1 Luas Wilayah Desa Bumisari Bumisari dalam Ha.....	43
Gambar 4.2 Mata Pencaharin Masyarakat Desa Bumisari .....	47
Gambar 4.3 Persentase Agama yang dianut oleh Masyarakat .....	47
Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	48
Gambar 4.5 Kegiatan Sosialisasi PKH .....	53
Gambar 4.6 Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga .....	58

# I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah serius yang masih menghantui banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengurangi tingkat kemiskinan global, jutaan orang masih terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk mereka lepaskan. Kemiskinan bukan hanya sekadar kurangnya sumber daya material, tetapi juga melibatkan kekurangan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan peluang untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Menurut Kartasasmita (1997) dalam (Rustanto, 2015) Kemiskinan adalah persoalan yang timbul karena disebabkan oleh pengangguran dan keterbelakangan. Permasalahan ini jika tidak ditangani dapat membuat orang merasa tidak setara, oleh sebab itu persoalan kemiskinan ini membutuhkan penanganan yang mendalam untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pada generasi mendatang (Nurisma, 2021).

Berbagai macam skema dikembangkan untuk mengetahui lebih jauh tentang kemiskinan, akan tetapi hingga kini belum ada cara yang jelas untuk menyelesaikannya (Prawoto, 2008). Salah satu pendekatan untuk membantu menanggulangi kemiskinan adalah melalui upaya pemberdayaan masyarakat (Bhinadi, 2017). Pemberdayaan masyarakat menjadi topik pembicaraan ramai di berbagai kalangan, dimana tujuannya adalah mengembangkan sumber daya masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan merupakan preferensi, kemandirian, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, harga diri, apresiasi, serta rasa saling memiliki dalam kelompok masyarakat (Sukesi, 2020). Melalui kegiatan pemberdayaan ini kelompok sasaran diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya melalui kegiatan

sosialisasi, pelatihan dan kegiatan lain yang bertujuan mengangkat mereka dari ketidakkberdayaan, pengucilan dan keterbelakangan (Haris, 2014).

Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan sebagai salah satu *epicentrum and center of excellence* dalam penyelesaian kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan (Mamangan, 2018). Program Keluarga Harapan atau lebih dikenal sebagai PKH, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau anggota keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Keluarga penerima manfaat PKH ditentukan melalui data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan untuk membantu keluarga menerima dan menggunakan layanan sosial dasar (Indonesia, 2021).

Menurut data resmi dari Kementerian Sosial RI, pada tahun 2020 PKH telah menjangkau 10,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2011 PKH mulai diperkenalkan di Provinsi Lampung meliputi kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan, program ini sudah berjalan selama 12 tahun dengan total 37.017 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 27.239.900.000.

Berikut ini adalah informasi secara rinci tentang Jumlah KPM PKH Provinsi Lampung Selatan.

**TABEL 1. Jumlah KPM PKH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Total KPM	Total Anggaran	No	Kecamatan	Total KPM	Total Anggaran
1	Bakauheni	247	163.850.000	11	Rajabasa	242	165.025.000
2	Candipuro	717	450.700.000	12	Sidomulyo	2.845	2.109.550.000
3	Jati Agung	3.618	2.702.725.000	13	Sragi	724	482.150.000
4	Kalianda	3.767	2.853.300.000	14	Tanjung Bintang	3.863	2.883.175.000
5	Katibung	4.940	3.685.175.000	15	Tanjung Sari	568	373.175.000
6	Ketapang	614	402.950.000	16	Way Panji	136	85.125.000
7	Merbau Mataram	762	510.950.000	17	Way Sulan	375	268.600.000
8	Natar	7.798	5.953.200.000				

9	Palas	3.526	2.530.175.000
10	Penengahan	2.274	1.619.850.000

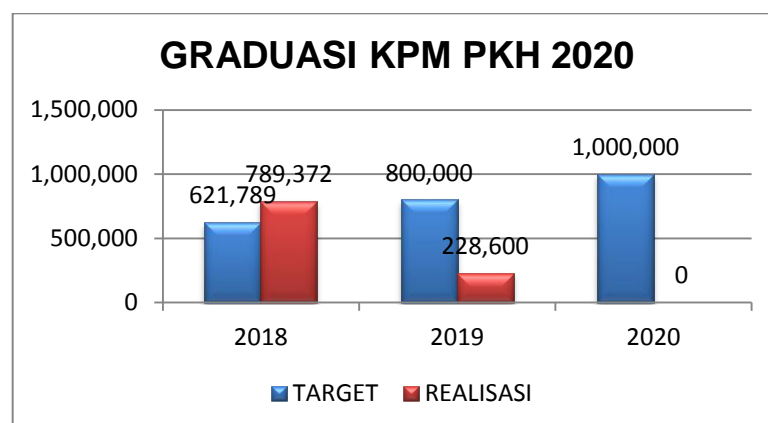
*Sumber: Arsip PPKH Kec. Natar*

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin yang memenuhi persyaratan keanggotaan, termasuk keluarga dengan ibu hamil, nifas, dan menyusui, balita, serta anak sekolah. Program ini juga memperhatikan penyandang disabilitas dan lanjut usia guna meningkatkan kesejahteraan sosial. PKH juga memberikan akses KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi (Khoiriyah, 2019). Pada tahun 2015, PKH meningkatkan layanannya dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan bagi KPM PKH. Kegiatan ini dikenal sebagai Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

FDS/P2K2 adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu mengubah perilaku keluarga penerima manfaat PKH. Program ini diberikan oleh Fasilitator/Pendamping Sosial PKH dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan panduan yang terstruktur dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan keluarga, seperti memberikan pelatihan dan informasi tentang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kepada KPM PKH sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu kegiatan ini juga membantu KPM PKH dalam mengembangkan kemampuan sosial dan mendukung partisipasi aktif mereka dalam program PKH dan masyarakat (Indonesia, 2021).

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tujuannya adalah untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari program PKH adalah graduasi KPM dari kepesertaan PKH. Graduasi merupakan akhir dari masa kepesertaan/keanggotaan KPM PKH, walaupun program tersebut masih berjalan. Graduasi KPM PKH dapat terjadi karena tidak memenuhisyarat kepesertaan, alasan lainnya adalah karena adanya penilaian bahwa penerima PKH telah memiliki kemampuan dan kemandirian yang cukup.

Berikut ini gambaran perkembangan graduasi KPM PKH di Indonesia:



Sumber : e-PKH, 2020

**Gambar 1.1 Perkembangan Graduasi KPM PKH di Indonesia**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa: Pada rentang waktu 2018 hingga pertengahan 2020, terdapat perbedaan antara target graduasi dan realisasi graduasi. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 27% dari target yang diharapkan, namun di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 71,4% dari target yang dicanangkan. Beberapa faktor umum yang mempengaruhi pencapaian target graduasi KPM PKH meliputi tingkat kemiskinan yang masih tinggi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta faktor internal program seperti kesulitan dalam identifikasi KPM yang memenuhi syarat graduasi dan kendala teknis dalam pelaksanaan program. Pada tahun 2020, pemerintah memiliki target graduasi sebesar 10% dari total 10 juta KPM PKH. Namun, target tersebut tidak tercapai karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan program PKH yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah KPM PKH sehingga pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak terpenuhi.

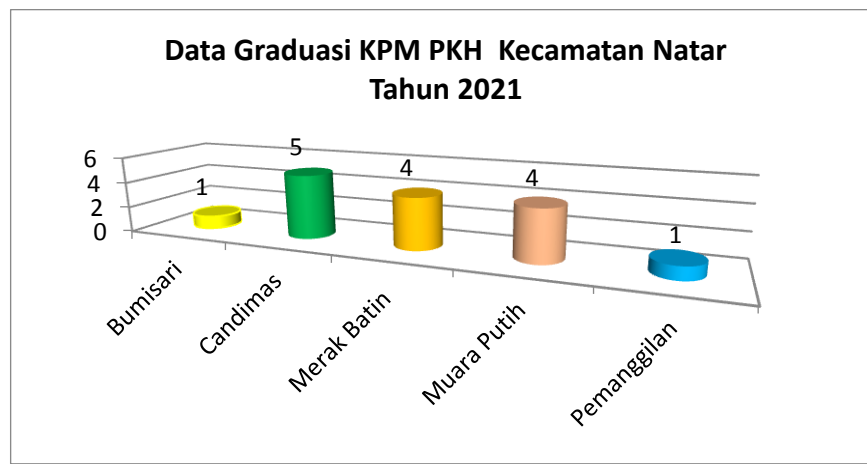
Graduasi merupakan hal yang menarik dan menjadi ciri dari bantuan sosial PKH serta menjadi ciri pembeda dari bantuan sosial lainnya. Menurut hasil penelitian (Armalid et al., 2020) faktor yang mempengaruhi graduasi mandiri KPM PKH adalah karena faktor intrinsik seperti keyakinan, rasa malu, kepercayaan dan motivasi. Sedangkan faktor ekstrinsik di pengaruhi oleh dukungan sosial keluarga dan pendamping PKH. Berikut ini capaian graduasi KPM PKH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019/2020:

**TABEL 2. REKAP GRADUASI KPM PKH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019/2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KPM	TOTAL GRADUASI	PENCAPAIAN GRADUASI (%)
1	Bakauheni	1.130	44	3,89%
2	Candipuro	2.617	504	19,26%
3	Jati Agung	5.050	636	12,59%
4	Kalianda	4.775	863	18,07%
5	Katibung	6.450	178	2,76%
6	Ketapang	2.701	424	15,70%
7	Merbau Mataram	3.891	161	4,14%
8	Natar	7.384	1448	19,61%
9	Palas	3.787	351	9,27%
10	Penengahan	2.559	131	5,12%
11	Rajabasa	1.725	46	2,67%
12	Sidomulyo	3.513	308	8,77%
13	Sragi	2.931	135	4,61%
14	Tanjung Bintang	3.774	509	13,49%
15	Tanjung Sari	1.966	116	5,90%
16	Way Panji	587	115	19,59%
17	Way Sulan	2.165	274	12,66%

*Sumber: Arsip Sekretariat PPKH Lampung Selatan*

Dari tabel 2 pada tahun 2019/2020 Kecamatan Natar menempati urutan pertama dalam pencapaian graduasi yaitu sebanyak 1.448 KPM dari Total 7.384 KPM atau sekitar 19,61% pencapaian target graduasi. Urutan kedua di tempati oleh Kecamatan Way Panji dengan pencapaian graduasi sebesar 19,59%. Candipuro menempati urutan ketiga dengan pencapaian 19,26%. Upaya pencapaian graduasi terus dilakukan oleh pendamping PKH, berikut ini adalah gambaran pencapaian graduasi tahun 2021 di Kecamatan Natar.



*Sumber: Arsip Sekretariat PPKH Lampung Selatan*

**Gambar 1.2 Graduasi KPM PKH Kec. Natar Tahun 2021**

Dari gambar 1.2 pencapaian graduasi KPM PKH Kecamatan Natar pada tahun 2021, urutan pertama diduduki oleh Desa Candimas dengan total 5 KPM yang memilih untuk melakukan graduasi. Urutan kedua ditempati oleh Desa Merak Batin dan Candimas dengan perolehan total yang sama yaitu sebanyak 4 orang yang melakukan graduasi. Urutan ketiga dengan perolehan 1 orang KPM yang mengundurkan diri adalah diduduki oleh Desa Bumisari dan Pemanggilan.

Berdasarkan hasil pra-riset penelitian, fenomena graduasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: karena adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, karena sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh program (non komponen PKH), serta timbulnya kesadaran dan perasaan malu dalam diri KPM. Salah satu pemicunya adalah karena pemasangan stiker atau cat label di rumah KPM PKH yang bertuliskan “Keluarga Pra Sejahtera Penerima PKH dan BPNT”.



Pendamping PKH memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan secara merata di wilayahnya. Namun, upaya untuk mengubah perilaku KPM PKH agar tidak bergantung pada bantuan sosial PKH seringkali mengalami kendala. Salah satu contoh kendalanya adalah ketika pendamping PKH sudah memberikan bimbingan dan pelatihan, namun beberapa KPM PKH masih merasa enggan untuk mandiri secara finansial. Kondisi sosial dan ekonomi di sekitar mereka juga bisa menjadi faktor penghambat dalam mencapai kemandirian. Selain itu, KPM PKH juga mengalami kesulitan dalam mengatasi tantangan dan rintangan dalam mencari sumber penghasilan yang baru dan berkelanjutan.

Hambatan-hambatan yang telah dijabarkan diatas dirasakan juga oleh pendamping PKH Desa Bumisari yang terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil pra observasi terdapat permasalahan kritis yang berkaitan dengan pencapaian graduasi KPM PKH di Desa Bumisari. Salah satu isu yang muncul kepermukaan adalah ketidakmampuan KPM PKH untuk mandiri secara finansial. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar KPM PKH masih berada dalam kondisi miskin dan memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitar mereka. Faktor-faktor yang menghambat kemandirian KPM PKH adalah kurangnya akses terhadap pelatihan dan keterampilan, infrastruktur yang terbatas, serta keterbatasan akses modal untuk pengembangan usaha yang mereka miliki.

Fenomena lain yang muncul adalah adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ketergantungan ini dapat terjadi ketika KPM PKH hanya mengandalkan bantuan sosial sebagai sumber utama atau satu-satunya sumber pendapatan mereka. beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan pada bantuan sosial. Salah satu faktor utama adalah kurangnya akses atau kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak atau pendapatan yang stabil. Kurangnya lapangan kerja, atau kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar dapat membuat sebagian masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam

situasi seperti ini, bantuan sosial menjadi sumber yang vital untuk memenuhi kebutuhan dasar.

KPM yang telah ketergantungan pada bantuan sosial PKH selama bertahun-tahun, tidak akan dengan mudah mengajukan diri untuk keluar dari kepesertaan PKH. Masa kepesertaan yang lama juga dapat membuat KPM kehilangan motivasi dan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial mereka. Temuan dilapangan menunjukkan dari total 248 KPM masih ditemukan sebanyak 75 KPM yang telah melebihi masa ideal kepesertaan PKH. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan masa ideal kepesertaan penerima bantuan PKH adalah maksimal 6 tahun. Pada tahun ke 5 menjelang berakhirnya masa kepesertaan, pendamping PKH akan melakukan resertifikasi kepada KPM PKH.

Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi. Apabila KPM tersebut masih memenuhi syarat maka pada masa transisi KPM yang bersangkutan masih mendapatkan bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban sebagai KPM PKH. Namun nyatanya, seiring dengan bertambahnya masa kepesertaan, KPM justru terbiasa dengan kondisi yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018, pasal 448 Pada poin e dikatakan “Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, II dan III memiliki fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan masyarakat miskin perdesaan, perkotaan, persisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan anatarnegra pada wilayah 1, II dan III permasalahan diatas dapat diselesaikan melalui pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.

Menurut (Hadiyanti, 2008) pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Menciptakan pribadi yang mandiri dan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyadari potensi yang dimiliki dan lingkungan sekitar dengan baik.
3. Meningkatkan etos kerja lingkungan yang baik agar dapat tercipta kondisi kerja yang prima dan saling mendukung.
4. Melatih dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat membuat perencanaan serta pertanggungjawaban terhadap tindakan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Melatih kemampuan dalam berpikir dan bernegosiasi serta mencari solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan ditemui dalam lingkungan bermasyarakat.
6. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui upaya peningkatan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.

Mengacu pada Iffe (2013) & (Yuhendra et al., 2022) pemberdayaan KPM PKH dapat dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH. Pendamping memiliki peran sebagai:

1. *Fasilitator*: Memberi dukungan ataupun motivasi kepada KPM PKH.
2. *Educator*: Membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi.
3. *Representasional*/perwakilan masyarakat: Peran ini mengacu pada interaksi antara pendamping dan lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat, mendukung, melindungi dan meningkatkan hubungan masyarakat.
4. *Teknis*: Dalam hal ini pendamping tidak hanya menjadi manager perubahan tetapi juga harus mampu melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, berkomunikasi dan bernegosiasi.

Penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu berkaitan dengan pemberdayaan KPM PKH dalam upaya meningkatkan graduasi pernah dilakukan oleh (Yanti & Adi, 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi graduasi dapat dilakukan dengan cara percepatan pola pikir dan perubahan perilaku KPM melalui kegiatan P2K2. Hasil penelitian (Kusumaningrum, 2020) juga menyebutkan bahwa aspek-aspek yang menjadi faktor pendorong KPM PKH melakukan graduasi mandiri terdiri dari: pola pikir, pengalaman pahit masa

lalu, semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, kemampuan mengelola uang, kemampuan menangkap peluang, disiplin dan komitmen, serta kepekaan sosial. Namun demikian, terdapat kajian yang menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu berhasil dalam meningkatkan graduasi mandiri KPM PKH.

Berdasarkan penelitian (Baharuddin & Allam'ro, 2022) yang menjadi faktor penghambat pencapaian graduasi KPM PKH di Kelurahan Soreang (Sulawesi Selatan) adalah akibat kurangnya materi dan pendampingan dalam tahap transformasi kemampuan dan kecakapan keterampilan. Penelitian (Angkotasan, 2022) juga menemukan bahwa upaya pendamping PKH untuk memberdayakan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik, namun masih jauh dari optimal. Faktor yang menghambat proses pemberdayaan ini adalah masyarakat itu sendiri, jumlah pendamping, dan letak geografis Desa/Kelurahan. Penelitian (Rahardjo et al., 2020) salah satu faktor yang menghambat proses kegiatan pemberdayaan adalah belum optimalnya tahapan transformasi materi karena singkatnya waktu pelaksanaan P2K2. Selain itu terdapat ketidakakuratan materi yang dibutuhkan oleh KPM. Penelitian (Dahlan Nur, 2021) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dapat menghambat proses pemberdayaan di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas proses pemberdayaan sangat penting bagi KPM PKH karena tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan taraf hidup. Dengan pemberdayaan, KPM PKH diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial PKH. Namun, upaya pemberdayaan tidak selalu berjalan lancar dan bisa menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Penelitian ini bisa membantu untuk menemukan metode dan pendekatan yang lebih efektif dalam pemberdayaan KPM PKH dan juga mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan yang telah dilakukan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana proses pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pendamping PKH dalam menjalankan perannya dalam upaya meningkatkan graduasi mandiri KPM PKH. Dengan judul penelitian “**Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Graduasi Mandiri di Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam upaya meningkatkan graduasi mandiri di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam upaya meningkatkan graduasi mandiri di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini secara teoretik diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan administrasi publik, terutama dalam pengembangan disiplin pemberdayaan masyarakat dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini dapat dijadikan landasan strategis dalam pematangan aspek-aspek organisasional/ kelembagaan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat. Selain memberi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten penelitian ini juga dapat memfasilitasi pengembangan metode dan teknik pemberdayaan masyarakat terutama berkaitan dengan proses kelembagaan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten sebagai bahan pertimbangan

dalam penyusunan strategi pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan dan penyuluhan yang lebih relevan dan berbasis pada keterlibatan masyarakat sebagai upaya mewujudkan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik.

## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan sebagai acuan tidak terlepas dari topik penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan dan graduasi mandiri KPM PKH antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti.	Teori yang dipakai.	Metode dan Alat Penelitian.	Hasil Penelitian.
1	Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan.  (Rahardjo et al., 2020)	Tahapan pemberdayaan menurut (Sulistyani, 2017). 1. Tahap penyadaran 2. Tahap transformasi kemampuan 3. Tahap peningkatan kemampuan	Jenis Penelitian kualitatif. Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi	Salah satu faktor yang menghambat proses kegiatan pemberdayaan adalah belum optimalnya tahapan transformasi materi karena singkatnya waktu pelaksanaan P2K2. Selain itu terdapat ketidakakuratan materi yang dibutuhkan oleh KPM PKH.
2	Analisis <i>Process</i> Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.  (Yanti & Adi, 2021)	Kerangka <i>Result-Based Management</i> (RBM)	Penelitian kualitatif. <i>In-dept Interview</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi graduasi dapat dilakukan dengan cara percepatan pola pikir dan perubahan perilaku KPM melalui P2K2.

3	<p>Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM).</p> <p>(Sukezi, 2020)</p>	<p>Variabel outcome P2K2 dan variabel inovasi</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Regresi linier berganda, uji t dan uji F</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel hasil P2K2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian dan keberhasilan graduasi sejahtera mandiri KPM PKH.</p>
4	<p>Rasionalitas Graduasi Mandiri sebagai Penerima PKH.</p> <p>(Riztiana, 2021).</p>	<p>Teori James Coleman tentang pilihan rasional.</p>	<p>Penelitian kualitatif. <i>Purposive sampling</i></p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa objektifitas KPM PKH yang memutuskan untuk graduasi mandiri dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, kuantitas dalam masyarakat, dan hukuman bagi penerima PKH.</p>
5	<p>Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri.</p> <p>(Armalid et al., 2020).</p>	<p>Faktor internal dan eksternal</p>	<p>Penelitian kualitatif. Wawancara mendalam dan analisis konten.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan ibu-ibu dari KPM mampu keluar dari bantuan PKH. Faktor internal yang mempengaruhi adalah kesadaran diri, perasaan malu, kepercayaan dan motivasi untuk memiliki usaha yang maju. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya dukungan sosial dari keluarga dan pendamping PKH</p>



## 2.2 Konsep Pembangunan

Kartasmita (1997) menjelaskan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Berkaitan dengan analisis mengenai pembangunan, Muhi et. Al 1993 (Mardikanto & Poerwoko, 2019; 9) menyampaikan sejumlah pendekatan teoritis, sebagai berikut:

- a. Teori Evolusi, yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi maupun ideologi.
- b. Teori Perubahan Sosial dari Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk “pembagian kerja”. Sedangkan Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan.
- c. Teori Struktural Fungsional dari Parsons (1851), yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:
  - (1) Adaptasi terhadap kebutuhan situasional;
  - (2) Pencapaian tujuan-tujuan;
  - (3) Integrasi atau pengaturuan tata-hubungan;
  - (4) Pola pemeliharaan atau pengurangan dari pola budaya tertentu.
- d. Teori Ekonomi. Gunar Mirdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:
  - (1) Hasil dan pendapatan;
  - (2) Tingkat produktivitas;
  - (3) Tingkat kehidupan;
  - (4) Sikap dan pranata;
  - (5) Rasionalitas.

Terkait dengan teori ini, Rostow (1962) mengemukakan adanya tahapan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tradisional, yaitu: persiapan tinggal landas,

tinggal landas, dorongan menuju kematangan, serta konsumsi masal yang sangat tinggi.

- a. Teori Konflik, yang di gagaskan oleh Karl Marx (1919-1883) menjelaskan bahwasanya pembangunan dapat berlangsung lantaran adanya pergesekan kebutuhan ekonomi antar kelas, antara kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).
- b. Teori Ekologi, yang di sampaikan oleh Odum (1971) mengenai ikatan antara manusia dan lingkungannya (fisik dan sosial). Menurut pendapatnya, pembangunan terjadi sebagai efek dari pendayagunaan sumberdaya alam yang melimpah, maupun optimasi pendayagunaan sumberdaya yang kian terbatas.
- c. Teori Ketergantungan yang kian meluas di Amerika Latin seperti yang dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) dimana negara maju menguasai negara yang belum berkembang, sehingga pembangunan di negara berkembang sangat bergantung kepada kehendak/kebutuhan negara maju yang menjadi “penjajah”nya.

Menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: Strategi pertumbuhan, pertumbuhan dan distribusi, teknologi tepat-guna, kebutuhan dasar, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan. Mengenai keenam konsep diatas, Kartasasmita (1997) menjelaskan: menurut kepustakaan ekonomi pembangunan, pembangunan sering dimaksudkan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan kapasitas produksi sumberdaya. Berdasarkan tinjauan tersebut akhirnya muncul konsep-konsep tentang *pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi*.

Dalam menyambut tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa perlu dijadikan prinsip atau landasan untuk melakukan pembaharuan (reformasi). Dalam hal ini pembangunan tidak sepatasnya hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi berkembang luas melainkan persoalan demokrasi dan hak-hak asasi manusia seharusnya juga menjadi pembicaraan dalam kajian-kajian

pembangunan. pembahasan mengenai beragam paradigma yang berupaya ke arah pembangunan berkeadilan, serta ketidakpuasan terhadap implementasi teori-teori tersebut.

### **2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah hal yang kompleks dan luas, sehingga banyak para ahli yang mengembangkan teori dan model pemberdayaan masyarakat. beberapa teori pemberdayaan masyarakat menurut para ahli antara lain:

1. Teori pemberdayaan komunitas (*community empowerment theory*) Zimmerman (1995) memperkenalkan konsep teori pemberdayaan komunitas yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Teori ini berfokus pada usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Perkins & Zimmerman, 1995).
2. Teori pemberdayaan berbasis hukum (*rights-based empowerment theory*) Kabeer (1999) mengembangkan suatu teori yang memberikan perhatian khusus pada pentingnya hak-hak individu dan kelompok dalam proses pemberdayaan. Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan seharusnya mencakup pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai dasar yang esensial (Kabeer, 1999).
3. Teori pemberdayaan berbasis sumberdaya (*resource-based empowerment theory*) yang diperkenalkan oleh Rappaport (1984) menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia di masyarakat sebagai landasan pemberdayaan. Teori ini mempertimbangkan bahwa sumber daya yang ada pada masyarakat seperti pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Maton & Rappaport, 1984).

Teori-teori pemberdayaan masyarakat memiliki peran krusial dalam membantu para ahli dan praktisi dalam mengembangkan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori tersebut, program pemberdayaan dapat dirancang secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dituju. Selain itu, teori-teori pemberdayaan masyarakat juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan peningkatan dan perbaikan program di masa depan. Teori pemberdayaan masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat secara aktif terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Sejak lama, istilah pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat telah dikenal di Indonesia sebagai respons terhadap meningkatnya angka kemiskinan yang melanda baik di perkotaan maupun di pedesaan. Istilah pemberdayaan pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh sejumlah NGO pada tahun 1990-an, sedangkan pemerintah baru mengadopsi istilah tersebut setelah konferensi Beijing tahun 1995. Paradigma pemberdayaan yang digunakan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada kepentingan rakyat dan mendorong inisiatif masyarakat yang berasal dari bawah. Berbagai program pemberdayaan telah diluncurkan oleh pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi profesi, namun belum semua program tersebut berhasil dengan baik. Pemberdayaan sendiri memiliki akar kata dari "daya", yang berarti kekuatan atau keberdayaan, dan dalam konteks pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai memberikan dukungan atau kekuatan kepada kelompok yang masih lemah dan belum mandiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan kelompok yang lemah di masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Menurut (Mardikanto & Soebianto, 2012) proses pemberdayaan mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup (baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan). Oleh karena itu, pemberdayaan dapat dianggap sebagai sebuah proses yang direncanakan untuk meningkatkan skala dan meningkatkan utilitas dari objek yang diberdayakan. Namun walaupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kelompok miskin, dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting terutama dukungan dari masyarakat yang menjadi sasarannya (Alfitri, 2011).

Pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan individu, khususnya kelompok yang lemah dan rentan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam tiga aspek yang berbeda. Pertama, pemberdayaan melibatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mereka merasa bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan serta memiliki kebebasan yang lebih luas, termasuk kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka. Kedua, pemberdayaan mencakup kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa berkualitas. Dan ketiga, pemberdayaan melibatkan kemampuan untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Suharto, 2010). Chambers dan Effendie memiliki pandangan yang berbeda terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menurut Chambers (1995) konsep pembangunan melalui model pemberdayaan masyarakat tidak hanya menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Noor, 2014). Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan, kemampuan, dan kekuatan kepada individu atau kelompok masyarakat yang lemah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pemberdayaan juga mendorong masyarakat untuk berani menyuarakan pendapat,

gagasan, dan ide-ide mereka serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan dasar penting dalam tingkatan individu dan sosial untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan (Efendi et al., 2021).

(Ariani et al., 2016) menyatakan bahwa Chambers berpandangan bahwa memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kualitas hidup dan status sosial kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konteks ini, memberdayakan berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat. Pendapat ini juga didukung oleh (Sutikno et al., 2015) yang berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi lapisan masyarakat yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberdayakan dan memberikan kemandirian pada masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu konsep pemberdayaan masyarakat mengalami perkembangan yang dinamis, termasuk pada era revolusi industri 4.0 yang tengah terjadi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, terdapat tiga aspek penting yang difokuskan, yaitu input, proses, dan output. Pada aspek input, konsep ini memberikan perhatian khusus pada empat sumberdaya, yaitu individu, keluarga, kelompok, dan kelembagaan. Sementara itu, pada aspek proses, konsep ini melibatkan empat aktivitas penting yaitu mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan, memperkuat keterampilan, dan mengelola sumber daya terkait seperti sumber daya keuangan, kemitraan, teknologi, dan lain-lain. Output merupakan bagian ketiga dari proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, output terdiri dari empat hal, yaitu individu berdaya, keluarga berdaya, kelompok berdaya, dan kelembagaan berdaya. Output-output tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelembagaan, meningkatkan semangat dan komitmen antar individu, komunitas, dan lembaga (Bahri, 2019).

### **2.2.2 Prinsip Pemberdayaan**

Menurut (La Patilaiya et al., 2022)terdapat empat prinsip penting dalam program pemberdayaan masyarakat:

#### **1. Prinsip Kesetaraan**

Prinsip kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat berarti menghargai dan memperlakukan semua pihak dengan adil dan sama rata tanpa terkecuali. Prinsip ini menekankan pentingnya mengedepankan kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan.

#### **2. Prinsip Partisipasi**

Prinsip partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat berarti melibatkan masyarakat secara aktif dan terlibat dalam seluruh tahap program pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dianggap penting karena mereka memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman langsung tentang permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang penting dalam merumuskan solusi.

#### **3. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian**

Prinsip keswadayaan dan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat berarti menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensi mereka sendiri, tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Prinsip ini menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan sumber daya yang ada di sekitarnya.

#### **4. Prinsip Berkelanjutan**

Prinsip berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat berarti program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan dan terus berlanjut meskipun pendampingan dari lembaga pelaksana program pemberdayaan sudah berakhir. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberdayakan mereka agar dapat mengelola kegiatan dan sumber daya yang ada secara mandiri.

### **2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat**

Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup dasar sehingga mampu mencapai kemandirian. Kemandirian yang dimaksud tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, namun juga meliputi aspek sosial, budaya, dan politik. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik dan memberikan hak politik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara bebas dan tanpa adanya tekanan atau iming-iming dari pihak tertentu. Dengan demikian, program pemberdayaan bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan terbaik bagi kehidupan mereka (Hamid, 2018).

Para ahli mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat memiliki berbagai makna. Menurut Wijaya (2002) tujuannya adalah untuk membangkitkan keterampilan di masyarakat dan mencapai motivasi, inisiatif, kreativitas, penghargaan, serta pengakuan terhadap individu yang luar biasa/seperti yang diungkapkan oleh (Hamdan et al., 2022). Pendapat (Suryana, 2010) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan individu dan masyarakat mandiri. Sementara itu, (Sulistiyani, 2004) juga berpendapat bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dalam segala hal, termasuk kemerdekaan dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan perbuatan.

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, keluarga, atau masyarakat dalam hal kekuasaan, kapasitas, dan kemampuan personal, interpersonal, atau politik guna memperbaiki situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Penerapan pemberdayaan dapat memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk menyikapi dan mengambil tindakan yang tepat demi keberlangsungan hidup mereka secara berkelanjutan, baik dalam pembentukan dan pembangunan struktur kelembagaan maupun dalam pembangunan nilai-nilai budaya.

Kesimpulannya adalah, para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat, namun secara umum mereka sepakat bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat



menjadi mandiri, baik dalam keterampilan maupun dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan perbuatan. Tujuan lainnya termasuk motivasi, inisiatif, pertumbuhan kreatif, dan penghargaan serta pengakuan bagi orang-orang yang luar biasa.

### **2.2.3 Tahapan Pemberdayaan**

Bantuan sosial saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam jangka panjang, oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga dapat keluar dari situasi kemiskinan secara berkelanjutan. Proses pemberdayaan mencakup memberikan keterampilan dan pelatihan, dukungan akses dan modal agar penerima bantuan sosial dapat memperoleh penghasilan sendiri dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program pemberdayaan sehingga menciptakan hubungan yang saling mendukung antara pemerintah, masyarakat, dan penerima bantuan sosial.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan tahapan-tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengelola aktivitas pemberdayaan. Hal ini dilakukan karena pemberdayaan bukanlah suatu proses instan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) dalam (Bahri, 2019) membagi tahapan-tahapan pemberdayaan menjadi tiga bagian meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar mereka. Pengkapasitasan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah. Sedangkan pendayaan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan mengakses sumber daya yang ada.

**Pertama, penyadaran.** Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin maka mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*”) diberdayakan dalam proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Teori Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesadaran diri. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain. Untuk itu, dalam proses pemberdayaan, diperlukan proses penyadaran melalui percakapan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Melalui proses penyadaran ini, masyarakat akan mulai berpikir dan menyadari bahwa program yang ditawarkan memiliki nilai penting bagi mereka (Ife & Tesoriero, 2008).

**Kedua, pengkapasitasan.** Tahap kedua dari proses pemberdayaan adalah pengkapasitasan atau *capacity building*. Proses ini dikenal juga dengan istilah memampukan atau *enabling*. Konsep dasar dari pengkapasitasan adalah memberikan daya atau kuasa kepada target yang hendak diberdayakan. Namun sebelum diberikan daya atau kuasa, target harus mampu terlebih dahulu. Proses pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dimaksudkan untuk memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara melatih, menyelenggarakan workshop, seminar, atau bentuk sosialisasi lainnya. Pada masa Orde Baru, konsep yang serupa dengan pengkapasitasan manusia dikenal dengan istilah “simulasi” dalam rangka sosialisasi Program Pemberdayaan Peningkatan Peran Perempuan (P4).

Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Pengkapasitasan organisasi ini sering diabaikan, pada maknanya “ibarat menyiapkan medium sebelum meletakkan sediaan. Sama halnya sebelum menanam bibit jagung, kita siapkan pula lahannya. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai adalah “aturan main”. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Sistem dan prosedur, peraturan dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika dan *good governance*. Pengkapasitasan nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” di antara mereka sendiri.

***Ketiga, pemberian daya atau empowerment.*** Secara sempit tujuan dari tahapan ini adalah memberikan kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada target sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Tujuan dari pemberian daya ini adalah agar target penerima bantuan dapat menjadi lebih mandiri, memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Konsep dasarnya adalah bahwa pemberian kekuasaan harus disesuaikan dengan kemampuan penerima. Sebagai contoh, pemberian kredit kepada kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, jika perputaran usaha mereka hanya mencapai lima juta rupiah, maka tidak bijaksana jika diberikan pinjaman atau modal sebesar lima puluh juta rupiah.

### 2.2.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan

Menurut (La Patilaiya et al., 2022) pelaksanaan program pemberdayaan dapat terhambat oleh individu atau faktor sistem sosial dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa gangguan yang mungkin terjadi:

**Tabel 4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan**

No.	Faktor Gangguan	
1	Isolasi dari komunitas eksternal	9 Keterpaduan sistem dan budaya
2	Kebiasaan dan adat	10 Pengaruh pemangku kepentingan
3	Ketergantungan pada orang lain	11 Kurangnya kepercayaan diri
4	Superego yang terlalu tinggi	12 Setia pada kode tertentu
5	Penolakan terhadap orang asing	13 Prasangka terhadap hal-hal baru
6	Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang lambat	14 Kecemasan dan ketidakberanian untuk berubah
7	Sikap tradisional yang menolak perubahan	15 Kesulitan mengubah beberapa kegiatan
8	Kritik dukungan modal riil yang terdiri dari bangunan dan infrastruktur juga dapat menjadi kendala dalam program pemberdayaan	

*Sumber: Diolah oleh Peneliti*

Dalam menghadapi kendala dalam program pemberdayaan, perlu diperhatikan bahwa tidak jarang terdapat satu atau dua kendala yang muncul secara terpisah, namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kendala-kendala tersebut muncul bersamaan dalam suatu program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat dan strategi yang tepat dalam menangani kendala-kendala tersebut agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya secara optimal.

### 2.2.6 Indikator Keberdayaan Masyarakat

Untuk menjamin fokus dan tujuan pemberdayaan yang tepat, seorang fasilitator harus memahami indikator-indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan seseorang dalam berdaya. Dengan begitu, pendampingan sosial dapat difokuskan pada aspek-aspek yang memerlukan perbaikan pada keluarga miskin sebagai

penerima manfaat perubahan. Indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh (Sumodiningrat, 1999), seperti:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap usaha peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin majunya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin efisien sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Suharto menyatakan pada tahun 2004 bahwa tingkat keberdayaan individu dalam aspek ekonomi, akses terhadap kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis, merupakan indikator keberhasilan program pemberdayaan. Semakin tinggi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, semakin meningkatkan tingkat keberdayaan. Keberhasilan program dapat diukur dari ketuntasan dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran, serta mencapai kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai dalam diri seseorang (Suharto, 2004).

## **2.3 Kemiskinan**

### **2.3.1 Pengertian Kemiskinan**

Menurut (Rustanto, 2015), Poerwadarminta mendefinisikan kemiskinan secara etimologis sebagai "miskin" yang artinya tidak memiliki harta. Namun, secara lebih luas, kemiskinan diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, atau keluarga dalam memenuhi standar hidup minimum yang berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya. Kuncoro juga menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum. Selain itu, menurut (Kartasasmita, 1997), kemiskinan dianggap sebagai masalah pembangunan yang ditandai dengan kenaikan pengangguran dan keterbelakangan yang memperparah ketimpangan.

Menurut pandangan (Friedmann, 1992), kemiskinan terjadi karena adanya kesenjangan dalam kesempatan untuk memperoleh kekuatan sosial. Pendapat lain dari Brendley yang dikutip dalam (Rustanto, 2015) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Salim juga menyatakan bahwa kemiskinan sering kali digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (Sugiyanto, 2022). Dalam Merriam-Webster's International Encyclopedia yang disebutkan dalam (Rustanto, 2015), kemiskinan dijelaskan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa atau kurangnya harta atau uang.

Melihat dari berbagai jenis kemiskinan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa di Indonesia, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan yang membuat sulitnya mencari pekerjaan, serta minimnya akses masyarakat terhadap program dan layanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.

### 2.3.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, masalah kemiskinan merupakan isu sosial yang sangat kompleks dan sulit untuk dipahami dengan baik. Masalah ini terutama sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan oleh (Nguyen & Nguyen, 2019) kemiskinan dapat disebabkan oleh: 1) Kesehatan yang buruk serta kurangnya tenaga kerja. 2) kurangnya kesempatan kerja atau pengangguran. 3) Kurangnya kemauan untuk bekerja. 4) Kurangnya kemauan untuk keluar dari kemiskinan. 5) Pendidikan. Pendapat Houghton dan Kandker (2009) yang terdapat dalam (Rustanto, 2015) sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa terdapat empat karakteristik utama penyebab kemiskinan yang dapat diidentifikasi melalui tabel 5.

**Tabel 5. Karakteristik Penyebab Kemiskinan**

1.	Karakteristik Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terisolasi atau terpencil, mencakup masalah infrastruktur yang buruk dan tertinggal sehingga sulit untuk mengakses pasar dan layanan publik.</li> <li>➤ Sumber daya alam, termasuk kemampuan tanah dan kualitas lahan.</li> <li>➤ Cuaca, termasuk kondisi iklim dan lingkungan lainnya.</li> <li>➤ Tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen.</li> </ul>
2.	Karakteristik Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan infrastruktur yang mencakup air bersih, jalan, listrik dan sejenisnya.</li> <li>▪ Distribusi lahan yang mempengaruhi akses terhadap sumber daya alam dan peluang usaha.</li> <li>▪ Kemampuan untuk mengakses barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya.</li> <li>▪ Struktur sosial dan modal sosial yang meliputi unsur-unsur seperti kepercayaan, norma, nilai, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.</li> </ul>
3.	Karakteristik Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luas rumah.</li> <li>○ Jumlah anggota keluarga yang menganggur atau belum bekerja.</li> <li>○ Jenis kelamin kepala keluarga, terutama jika masih muda.</li> <li>○ Asal-usul keluarga, seperti kepemilikan tanah, peralatan, alat produksi, rumah, perhiasan, dan sebagainya.</li> <li>○ Pekerjaan dan penghasilan keluarga.</li> <li>○ Kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan anggota keluarga.</li> </ul>
4.	Karakteristik Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Usia</li> <li>❖ Tingkat pendidikan</li> <li>❖ Status perkawinan</li> <li>❖ Asal suku atau daerah.</li> </ul>

*Sumber: Diolah oleh penulis, 2023*

## **2.4 Program Keluarga Harapan**

### **2.4.1 Kebijakan Program Keluarga Harapan**

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. PKH memberikan bantuan uang kepada individu, keluarga, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka serta meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial disalurkan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Rekening ini mencakup seluruh program bantuan sosial dan harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya jika sudah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial.

### **2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan memberikan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta meningkatkan pendapatan mereka;
3. Membantu mengubah perilaku dan meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
4. Menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat;
5. Memperkenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan.



### 2.4.3 Besaran Bantuan yang diterima KPM PKH

Bantuan sosial PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan batasan maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Keluarga penerima manfaat terdiri dari beberapa kategori, di antaranya: ibu hamil/nifas yang dibatasi maksimal kehamilan ke-2, anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak, anak SD sebanyak-banyaknya 1 anak, anak SMP sebanyak-banyaknya 1 anak, anak SMA sebanyak-banyaknya 1 anak, lanjut usia 70 tahun ke atas sebanyak-banyaknya 1 orang, dan disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang. Bantuan sosial akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat apabila memiliki kategori seperti yang telah dijelaskan di atas atau memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1 Indeks Bantuan Sosial PKH

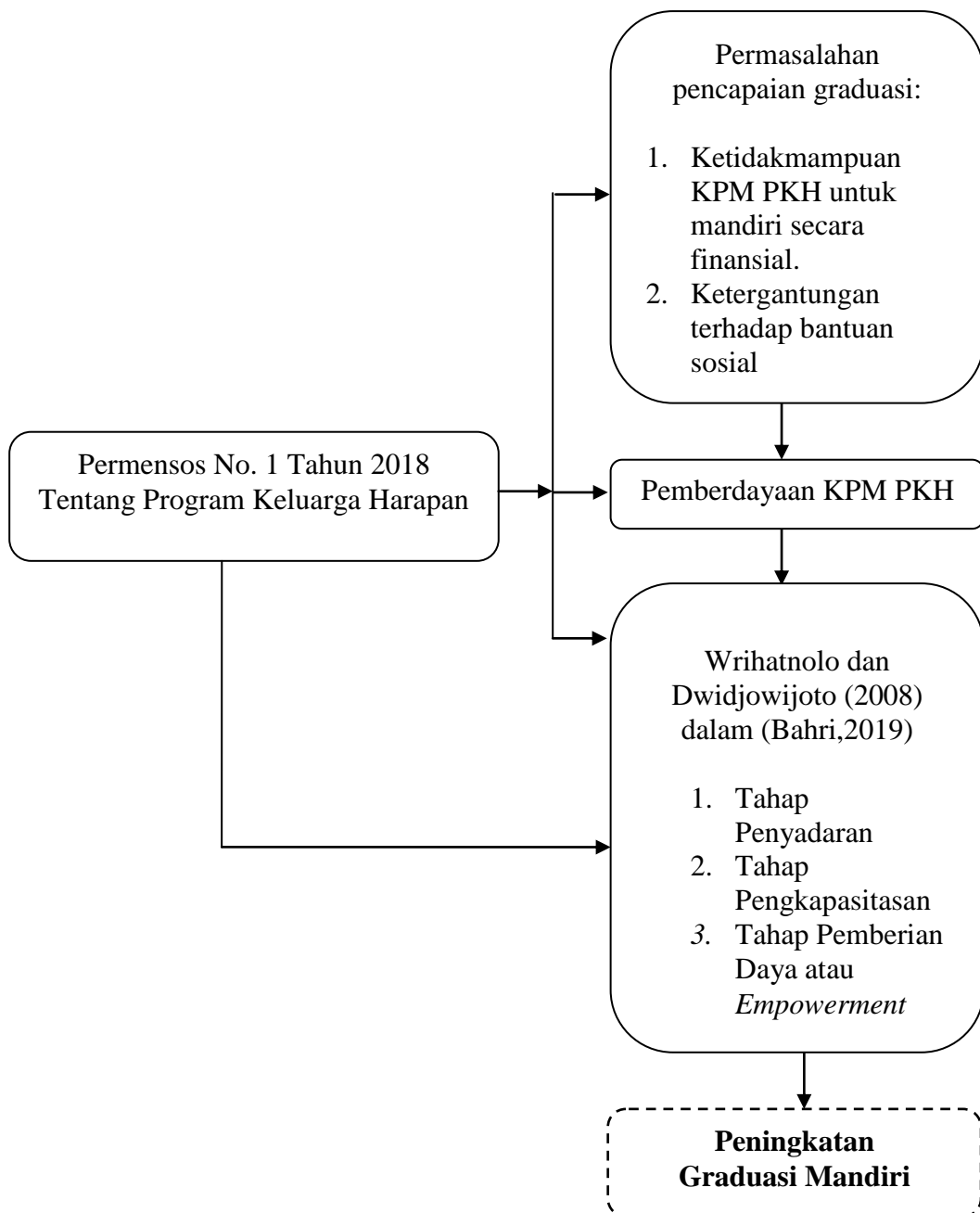
<b>INDEKS BANTUAN SOSIAL</b>		
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		
<b><u>Anak SD/Sederajat</u></b>	<b><u>Ibu Hamil</u></b>	<b><u>Lansia 70 Tahun ke atas</u></b>
<b>Rp. 225.000</b> <i>Per Triwulan</i>	<b>Rp. 750.000</b> <i>Per Triwulan</i>	<b>Rp. 600.000</b> <i>Per Triwulan</i>
<b>Rp. 900.000</b> <i>Per Tahun</i>	<b>Rp. 3.000.000</b> <i>Per Tahun</i>	<b>Rp. 2.400.000</b> <i>Per Tahun</i>
<b><u>Anak SMP/Sederajat</u></b>	<b><u>Anak SMA/Sederajat</u></b>	
<b>Rp. 375.000</b> <i>Per Triwulan</i>	<b>Rp. 500.000</b> <i>Per Triwulan</i>	
<b>Rp. 1.500.000</b> <i>Per Tahun</i>	<b>Rp. 2.000.000</b> <i>Per Tahun</i>	
<b><u>Anak Usia 0-6 Tahun</u></b>	<b><u>Disabilitas Berat</u></b>	
<b>Rp. 750.000</b> <i>Per Triwulan</i>	<b>Rp. 600.000</b> <i>Per Triwulan</i>	
<b>Rp. 3.000.000</b> <i>Per Tahun</i>	<b>Rp. 2.400.000</b>	

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan uang tunai dan pemberdayaan. Bantuan uang tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Program ini juga memberikan program-program kesehatan dan gizi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Namun, pemberdayaan juga merupakan aspek penting dalam program ini, dan penilaian kinerja SDM sangat penting dalam mengimplementasikan program dan menjadi barometer kemampuan atau penilaian kinerja SDM dalam pengimplementasian program.

Pemberdayaan terhadap KPM PKH tidak selalu berhasil dan banyak KPM PKH mengalami kesulitan untuk lulus atau graduasi dari program. Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, faktor utama rendahnya tingkat graduasi KPM PKH adalah ketidakmampuan mereka untuk mandiri secara finansial yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial juga menjadi penyebab karena sebagian KPM PKH yang sudah lama menjadi peserta program cenderung terlalu bergantung pada bantuan sosial sehingga kurang memiliki motivasi untuk mandiri secara finansial. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan minimnya akses pada lapangan kerja yang memadai juga membuat bantuan sosial menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) menyebutkan untuk mengidentifikasi masalah pemberdayaan dapat melalui tiga tahapan pemberdayaan yaitu: 1) Tahap Penyadaran; 2) Tahap Pengkapasitasan; 3) Tahap Pendayaan. Dengan demikian, perlu dilakukan pemberdayaan agar KPM PKH dapat mandiri secara finansial dan tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial sehingga dapat meningkatkan tingkat graduasi dari program PKH. Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti akan menggambarkan skema kerangka konsep dalam kaitannya pemberdayaan KPM PKH dalam upaya meningkatkan graduasi untuk mempermudah arah penelitian.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian**

*Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2023).*

### **III. Metode Penelitian**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam meningkatkan graduasi mandiri di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Pendekatan studi kasus merupakan sebuah teknik penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap sebuah kasus tertentu yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau kejadian yang spesifik. Umumnya pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis data dan informasi yang terkait dengan kasus tersebut seperti wawancara, observasi dan dokumen-dokumen terkait.

Menurut Denzin dan Lincoln (1987) seperti yang dikutip oleh (Fuad & Nugroho, 2014) metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian ilmiah yang memanfaatkan berbagai teknik dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara deskriptif dan mendalam. Dalam penjelasan (Moleong, 2007), metode ini disebut sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata atau gambar dan bukan angka. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk penyajian laporan adalah kutipan data dan hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menawarkan keterbatasan dalam pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk memusatkan penelitian pada topik yang menjadi tujuan penelitian. Untuk mengkaji proses pemberdayaan KPM PKH dalam upaya meningkatkan graduasi mandiri di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2008) dalam (Bahri, 2019). 3 Tahapan pemberdayaan itu terdiri atas:

#### **1. Tahap Penyadaran**

Pada tahap penyadaran dalam proses pemberdayaan, target yang ingin diberdayakan diberi "pencerahan" tentang hak mereka untuk memiliki sesuatu. Misalnya, jika target adalah kelompok masyarakat miskin, mereka diberi pemahaman bahwa mereka dapat keluar dari kemiskinan jika memiliki kapasitas yang memadai. Program-program yang dilakukan pada tahap ini mencakup pengetahuan kognitif, keyakinan, dan pemulihan. Prinsip utamanya adalah membuat target memahami bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari pihak luar.

Dalam tahap ini peneliti akan menganalisis yang berkaitan dengan:

- a) Pemahaman KPM tentang tujuan Program bantuan sosial PKH
- b) Kesadaran KPM PKH akan hak dan kewajibannya

#### **2. Tahap Pengkapasitasan**

Pengkapasitasan merupakan tahap kedua dalam proses pemberdayaan yang juga dikenal sebagai capacity building atau memampukan. Konsep dasar dari pengkapasitasan adalah memberikan daya atau kuasa kepada target yang ingin diberdayakan. Namun, sebelum diberikan daya atau kuasa, target harus memiliki kapasitas yang cukup. Pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis, yaitu pengkapasitasan Individu, organisasi, dan sistem nilai.

Pada Tahap pengkapasitasan, peneliti akan menganalisis tentang:

a) Pengkapasitasan Individu

Pengkapasitasan individu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu yang merupakan anggota keluarga penerima manfaat PKH. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah tentang pendidikan dan pelatihan KPM PKH

b) Pengkapasitasan Organisasi

Pengkapasitasan organisasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan proses untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan dari pengkapasitasan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan dan dampak program, serta memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program PKH. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pengkapasitasan pendamping sosial PKH

c) Pengkapasitasan sistem nilai

Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Sistem dan prosedur, peraturan dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika dan *good governance*. Pengkapasitasan nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” di antara mereka sendiri.

### **3. Tahap Pemberian Daya atau *Empowerment***

Pemberian daya atau empowerment merupakan tahap penting dalam proses pemberdayaan yang memiliki tujuan memberikan kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada target sesuai dengan kualitas kecakapan yang mereka miliki. Tujuan utama dari pemberian daya ini adalah untuk meningkatkan kemandirian target penerima bantuan, memperkuat rasa percaya diri mereka, dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini peneliti

akan menganalisis yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan KPM PKH

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi/tempat dimana peneliti akan menangkap fenomena dan mengambil atau memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Bumisari Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena Desa Bumisari memiliki KPM PKH yang sudah melebihi masa ideal kepesertaan (6 tahun), memiliki KPM PKH potensial (yang sudah memiliki usaha) yang dapat dipersiapkan sebagai calon graduasi. Alasan penunjang lainnya adalah karena Desa tersebut mudah di akses dari segi geografis maupun infrastruktur sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data.

### 3.4 Instrumen Penelitian

(Irawan, 2006) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen yang paling penting. Peneliti memiliki peran utama dalam penelitian kualitatif karena dapat merasakan, mengalami dan melihat secara langsung objek atau subjek yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga memiliki kemampuan untuk menentukan kapan kesimpulan sudah cukup, kapan data sudah jenuh, dan kapan penelitian dapat dihentikan. Peneliti juga dapat melakukan pengumpulan data secara langsung, merenung secara terus menerus, dan secara bertahap membangun pemahaman yang mendalam.

Dalam pengumpulan data, peneliti sebagai *participant observer* menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen utama, dan data yang diperoleh melalui dua jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, untuk mendukung pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti panduan wawancara, alat perekam suara, buku catatan, dan kamera.

### 3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. *Focus Group Discussion (FGD)*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Focus Group Discussion (FGD)*, yang merupakan suatu metode kualitatif yang melibatkan diskusi kelompok kecil dalam sebuah topik tertentu dengan tujuan untuk memahami pandangan, opini dan pengalaman peserta terkait topik tersebut. Menurut Stewart & Shamdasani (1990) dalam (Totok & Poerwoko, 2013) FGD merupakan suatu metode wawancara pada penelitian kualitatif yang dilakukan dengan sekelompok informan secara terfokus yang sering disebut dengan "*in depth interview*". FGD direncanakan melalui beberapa tahap seperti perumusan tujuan FGD seperti: persiapan pertanyaan, pemilihan partisipan, persiapan lokasi FGD, pelaksanaan FGD, analisis data, dan penulisan laporan.

FGD merupakan diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan program. Diskusi ini difasilitasi oleh seorang pemandu yang memiliki peran strategis dalam memandu diskusi agar dapat menghasilkan hasil yang berkualitas. Krueger (1994) dalam (Totok & Poerwoko, 2013) menjelaskan beberapa jenis pertanyaan yang harus disiapkan dalam FGD, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanyaan pembuka, yang berfungsi untuk memecahkan kebekuan dalam menciptakan suasana yang nyaman.
2. Pertanyaan pengantar, yang membahas isu umum terkait topik diskusi, seperti kepemilikan aset dan usaha yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Pertanyaan transisi, yang membuka wawasan partisipan tentang isu-isu pokok yang terkait topik diskusi, seperti pemahaman KPM tentang syarat dan ketentuan bantuan PKH.
4. Pertanyaan kunci, yaitu pertanyaan tentang isu utama yang akan dibahas dalam FGD, seperti lamanya KPM menerima bantuan PKH, jumlah tanggungan, pendapatan, klasifikasi kelayakan penerima PKH menurut



sudut pandang KPM, dan efektivitas proses pemberdayaan dalam mencapai target graduasi.

5. Pertanyaan penutup, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan catatan tambahan atau pendapat terakhir tentang topik diskusi.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan *key informan* sebagai subjek utama penelitian. Menurut Bungin (2007) seperti yang dikutip oleh (Anufia & Alhamid, 2019), *key informan* merujuk pada individu yang memiliki pengetahuan yang paling mendalam tentang objek atau data yang sedang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, dalam konteks ini orang yang berperan sebagai *key informan* adalah:

**Tabel 6. Profil Informan Penelitian**

No	Nama	Total
1	KPM PKH angkatan 2007	10
2	KPM PKH Potensial (memiliki usaha)	20
3	Pendamping PKH Kec. Natar	2
4	Koordinator Kabupaten PKH Lam-Sel	1
5	Koordinator Kecamatan Natar	1

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

## 2. Observasi

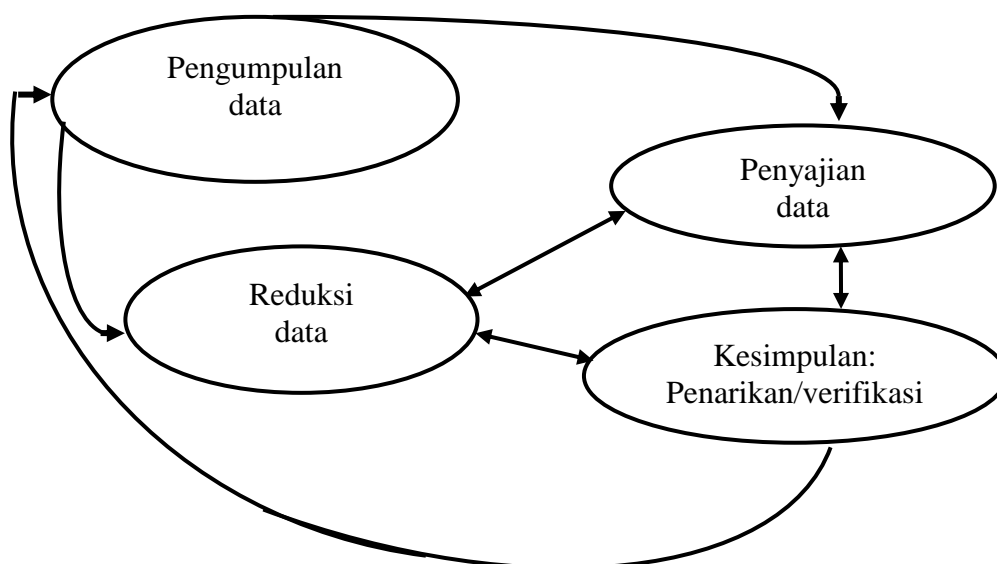
Teknik observasi digunakan sebagai teknik tambahan dalam pengumpulan data untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Melalui teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang tidak bisa didapatkan melalui wawancara, sehingga data yang terkumpul dapat melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan dalam kegiatan observasi meliputi:

1. Aktor, orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan KPM PKH.
2. Proses pemberdayaan KPM PKH.
3. Situasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan KPM PKH.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (1998) dalam (Rijali, 2019) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk merapikan dan menganalisis catatan hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya agar peneliti dapat memahami secara lebih baik kasus yang sedang diteliti dan mempresentasikan temuan penelitiannya kepada orang lain. dalam hal ini teknis analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dijelaskan dalam buku (Sugiyono, 2012).

Teknik analisis data Miles Huberman dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



**Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)**  
**Sumber: Sugiyono, 2012**

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pengumpulan data dan analisis data saling berinteraksi secara langsung. Pengumpulan data adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses analisis data. Reduksi data merupakan upaya untuk melengkapi dan mengelompokkan data ke dalam unit konseptual, kategori dan tema tertentu. Data yang telah direduksi kemudian diolah agar gambaran yang dihasilkan menjadi lebih lengkap, baik dalam bentuk sketsa, ringkasan, matriks

atau format lainnya. Penting untuk memfasilitasi penjelasan dan konfirmasi kesimpulan agar proses analisis data menjadi valid. Proses ini harus dilakukan secara bergantian dan tidak hanya dilakukan sekali saja.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini meliputi proses merangkum, memilih, fokus pada yang penting dan mencari tema dan pola pada data. Proses reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian. Data dari wawancara lapangan dianalisis dengan cara penyempurnaan informasi, pengelompokan berdasarkan kategori, dan panduan signifikansi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini meliputi penyusunan informasi yang menarik kesimpulan dan memberikan peluang untuk mengambil tindakan. Data yang telah disusun dalam matrik analisis disajikan dalam bentuk narasi, gambar, tabel, foto dan bagan. Dokumen juga digunakan sebagai data pendukung.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini meliputi verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, persamaan, hipotesis dan lainnya. Namun, kesimpulan yang diambil terus ditinjau ulang selama penelitian untuk memastikan kesimpulan yang masuk akal.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkank kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*(Sugiyono, 2015).

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

#### a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih sama. Setelah melalui tahap pengecekan data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

#### b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti dapat membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara itu, peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

#### c. Triangulasi

Triangulasi merupakan upaya pengujian tingkat kepercayaan dan kredibilitas data dengan menggabungkan kumpulan data yang diperoleh melalui berbagai cara dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi teknik selain memeriksa kredibilitas data yang diperoleh juga terkait dengan kekuatan data dalam menggambarkan realitas/ kenyataan.

2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007)

3. *Dependability*

Penelitian yang *Dependability* atau reabilitas adalah apabila penelitian yang telah dilakukan orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Confirmability*

Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian ini adalah proses pemberdayaan di Desa Bumisari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan sudah dilakukan namun belum mampu mendorong KPM PKH untuk melakukan graduasi mandiri. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan KPM PKH di desa tersebut.

**Pada tahap penyadaran,** pemahaman KPM terhadap bantuan sosial PKH masih beragam, namun dapat pandangan positif terhadap upaya peningkatan kemampuan keluarga, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat efektivitas pelaksanaannya.

**Pada tahap pengkapasitasan,** pada pengkapasitasan individu KPM PKH belum menunjukkan peningkatan yang signifikan namun upaya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dilakukan pada tahap pengkapasitasan organisasi.

**Pada tahap pemberian daya atau *empowerment*,** terdapat beberapa tantangan yang menghambat pemerintah dalam memberikan daya kepada KPM PKH, seperti keterbatasan anggaran, alokasi sumber daya yang tidak merata, koordinai antar lembaga yang tidak optimal dan tantangan pemantauan dan evaluasi.

## 5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pelaksanaan pemberdayaan KPM PKH di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, disarankan untuk melakukan tindakan berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada KPM PKH mengenai hak, kewajiban, tujuan, manfaat, dan besaran bantuan sosial PKH.
2. Mengatasi kendala-kendala dalam tahap pengkapasitasan melalui peningkatan kesadaran, motivasi, penyediaan peralatan, penyampaian materi yang menarik, dan pengembangan kapasitas SDM PKH.
3. Memperkuat program pemberdayaan seperti PENA dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pendamping PKH dalam pengembangan usaha.
4. Meningkatkan alokasi dana yang tepat guna untuk memberdayakan KPM PKH secara merata.

Dengan melakukan langkah-langkah diatas, diharapkan proses pelaksanaan pemberdayaan KPM PKH di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi KPM PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alcolea-Díaz, G. A.-D., Reig, R. R., Mancinas-Chávez, R. M.-C., Alcolea-Díaz, G., Reig, R., & Mancinas-Chávez, R. (2020). UNESCO's Media and Information Literacy curriculum for teachers from the perspective of Structural Considerations of Information. *Comunicar. Media Education Research Journal*, 28(1).
- Alfitri. (2011). *Community development: Teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Angkotasan, M. A. (2022). *Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan (pkh) oleh dinas sosial di kecamatan sirimau kota ambon provinsi maluku*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Armalid, I. I., Purboningsih, E. R., Widiastuti, T. R., & Ninin, R. H. (2020). Studi Eksplorasi: Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- Baharuddin, M., & Allam'ro, H. (2022). *Pemberdayaan keluarga penerima manfaat (kpm) program keluarga harapan (pkh) melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (p2k2) di kelurahan soreang kecamatan lau kabupaten maros*. Institut pemerintahan dalam negeri.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts* (Vol. 25). London: Intermediate technology publications.
- Dahlan Nur, B. (2021). *Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Mempercepat Graduasi Sejahtera Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Dietrich, A. (2004). The cognitive neuroscience of creativity. *Psychonomic Bulletin & Review*, 11, 1011–1026.
- Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifatu, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., & Nurhidayah, R. E. (2021). *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Jember: Polije Press.



- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. John Wiley & Sons.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan praktis penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Hamdan, A., Tanujaya, M. A. R., & Karwati, L. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program badan usaha milik desa (bumdesa) dalam meningkatkan ekonomi keluarga. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 22–32.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 265.
- Indonesia, K. S. R. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Irawan, P. (2006). Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. *Jakarta: DIA FISIP UI*.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kartasasmita, G. (1997). *Kemiskinan*. Balai Pustaka.
- Khoiriyah, N. (2019). Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Pati. *KOMUNITAS*, 10(2), 143–156.
- Korten, D. C. (1995). When Corporations Rule the World (Earthscan, London). *The Ethics of International Transfer Pricing*, 381, 96–10.
- Kusumaningrum, R. (2020). Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat Untuk Graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- La Patilaiya, H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., Siburian, U. D., Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Get Press.

- Mamangan, J. I. S. (2018). The Impact of Conditional Cash Transfer (CCT) to Socio-Economic of Poor Families; A Case Study. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(1), 32–39.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Maton, K. I., & Rappaport, J. (1984). Empowerment in a religious setting: A multivariate investigation. *Prevention in Human Services*, 3(2–3), 37–72.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Nguyen, H. H., & Nguyen, N. V. (2019). Factor affecting poverty and policy implication of poverty reduction: A case study for the Khmer ethnic people in Tra Vinh Province, Viet Nam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(1), 315–319.
- Nurisma, N. (2021). *Analisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan (pkh) di desa simpang kota medan, kecamatan kelayang, kabupaten indragiri hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Rahardjo, B., Ediyono, S., & Putri, D. K. (2020). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 2(2), 72–77.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Riztiana, L. (2021). Rasionalitas graduasi mandiri sebagai penerima pkh di desa babadan kabupaten nganjuk. *Paradigma*, 10(1).
- Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations: Modifications of a model for telecommunications. *Die Diffusion von Innovationen in Der Telekommunikation*, 25–38.
- Rustanto, B. (2015). Menangani kemiskinan. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Sen, A. (2017). Collective choice and social welfare (Expanded ed.). *Harvard University*.

- Stanovich, K. E., & West, R. F. (2008). On the relative independence of thinking biases and cognitive ability. *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(4), 672.
- Sugiyanto, Ms. (2022). Kebijakan kependudukan mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, 15(31).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1–12.
- Suharto, E. (2004). Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues. *Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Di Indonesia: Kecenderungan Dan Isu*, Makalah Yang Disampaikan Pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2.
- Suharto, E. (2010). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat (Developing community and empowering people). *Bandung: PT. Refika Aditama*.
- Sukei, S. (2020). Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) di Jawa Timur. *CAKRAWALA*, 14(1), 16–26.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryana, S. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Negeri Semarang.
- Sutikno, S., Soedjono, E. S., Rumiati, A. T., & Trisunarno, L. (2015). Pemilihan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 135–147.
- Syarifuddin, S., Ilyas, J. B., & Sani, A. (2021). Pengaruh Persepsi Pendidikan & Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Dinas Dikota Makassar. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2).
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*, 114–115.

- Ulum, M. C. (2016). *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2016). *Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning*.
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2021). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 146–163.
- Yuhendra, Y., Adi, I. R., & Rahayu, E. (2022). Analysis of the Role of Social Facilitators in the Implementation of Social Entrepreneurship Program in DKI Jakarta Province. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(12), 47–59.